

Abstrak

Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan, Teori Keadilan

Abstract

The legal vacuum causes diverse interpretations and often harms interfaith couples. Using normative juridical methods by reviewing various written regulations and literature studies to understand how the principles of justice are applied in this context. Based on the Administering Law which was updated by Law Number 24 of 2013, marriages that have been decreed by a court, including interfaith marriages, are recognized administratively. However, challenges remain because religious views that prohibit allowing marriages of different religions influence the acceptance of positive laws. This research examines how theories of justice, especially theories of distributive and retributive justice, can be used to assess policies and practices for registering interfaith marriages. The results of the analysis show the need for harmonization between state law and religious values to ensure fair treatment for all citizens, without discrimination based on religion. The research conducted can provide knowledge and input for policy or regulation makers and providers when formulating more inclusive and fair regulations regarding interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: Registration, Marriage, Theory of Justice